



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**RENCANA KERJA
TAHUN 2026**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 dapat disusun.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam penyajian Rencana kerja ini masih belum sempurna, untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan kesempurnaan Renja ini.

Kuala Tungkal, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Muhammad Natsir, S.I.P
Pembina Tingkat I
NIP. 198406242011011005

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD dan Pencapaian Renstra DPMD s/d Tahun 2025	10
Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD.....	18
Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	20
Tabel T-C.32.Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan Tahun 2026	29
Tabel T-C.33.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Menurut Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan;

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan rancangan akhir dan
- f. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 adalah;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023 -2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang RT/RW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 – 2044;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4)
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026.
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk menjabarkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja ini bertujuan untuk mempermudah pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026, sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2025 akan menjadi perbandingan dengan Rencana Kerja Tahun 2026, sehingga akan dijadikan tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 secara sistematika disajikan dan diuraikan setiap bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DPMD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMD

- 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD**BAB V. PENUTUP****LAMPIRAN**

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA DPMD TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPMD**

Rencana Kerja SKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi SKPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2025 sebagai berikut;

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari 6 kegiatan, yaitu;

a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, terdiri dari 1(satu) sub kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran Rp58.970.000,-

b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran Rp3.754.372.581,- terdiri dari 2(dua) sub kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran Rp3.526.972.581,-.

2. Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp227.400.000,-

c. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, terdiri dari, terdiri dari 1(satu) sub kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp42.500.000,-

d. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan anggaran Rp602.427.400,- terdiri dari 6(enam) sub kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesarRp3.284.000,-

2. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp42.990.000,-

3. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar Rp13.500.000,-

4. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp41.664.400,-
5. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp5.000.000,-
6. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp495.989.000,-
- e. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran sebesar Rp126.780.000,- terdiri dari 3(tiga) sub kegiatan, yaitu;
 1. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran Rp2.000.000,-
 2. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran Rp88.280.000,-
 3. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran Rp36.500.000,-
- f. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 3(tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp307.950.000,-, yaitu;
 1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran sebesar Rp176.510.000,-
 2. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran Rp9.460.000,-
 3. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran Rp121.980.000,-

II. Program Penataan Desa

Program ini dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa adalah upaya meningkatkan penataan desa dengan anggaran Rp64.362.000,- dengan sub kegiatan, yaitu;

1. Sub kegiatan Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa dengan anggaran Rp64.362.000,- untuk melakukan perubahan status Desa Sungai Ari (Desa Suban Kecamatan Batang Asam) dan Desa Rimbo Asri (Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi)

III. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan anggaran sebesar Rp1.027.019.800,- yang terdiri dari;

1. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dengan anggaran Rp146.937.000,- untuk melaksanakan penyaluran dan pembinaan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
2. Sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan anggaran Rp126.956.000,-.
3. Sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa dengan anggaran sebesar Rp71.692.000,- untuk melaksanakan pembinaan terhadap pengurus BUMdesa.
4. Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa Rp39.750.000,-.
5. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa dengan anggaran Rp44.450.000,- untuk tenaga operator aplikasi prodeskel.
6. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa dengan anggaran Rp51.788.000,- untuk pembinaan aset desa.
7. Sub kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD dengan anggaran sebesar Rp209.907.000,- untuk 114 orang anggota BPD.
8. Sub kegiatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa dengan anggaran Rp158.350.000,- untuk 10 desa.
9. Sub kegiatan fasilitasi pembinaan laporan kepala desa dengan anggaran sebesar Rp57.639.800,-
10. Sub kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan untuk penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan dengan anggaran Rp124.550.000,-

IV. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

Program ini dengan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp1.332.081.000,- yang terdiri dari;

1. Sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat dengan anggaran Rp158.781.000,- untuk pelaksanaan lomba posyandu
2. Sub kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna dengan anggaran Rp73.300.000,- untuk perlombaan teknologi tepat guna
3. Sub kegiatan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Rp1.100.000.000,- untuk pelaksanaan 10 program pokok PKK.

Berikut disajikan Tabel T-C.29;

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)					
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9(4+6+8)	10=(9/3)		
	Nilai SAKIP DPMD	72	71,11	71,3	67,2	94%	71,5	71	99%		
URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM DPMD	83	80,55	81	82,1	101%	83	82	99%		
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah jenis laporan tahunan yang disusun	36 dokumen	18 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	83%		
Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	48 laporan triwulan	24 laporan triwulan	8 laporan triwulan	8 laporan triwulan	100%	8 laporan triwulan	8 laporan triwulan	83%		
Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	600%	300%	100%	100%	100%	100%	100%	83%		
Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	162 orang	79 orang	26 orang	25 orang	96%	26 orang	25 orang	80%		
Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	72 dokumen	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	83%		

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase peningkatan disiplin pegawai	600%	300%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	498 paket	194 paket	146 paket	146 paket	100%	100 paket	100 paket	88%
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	0	0	0	0%	0	0	0%
Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase cakupan layanan administrasi umum	600%	300%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	72 paket	36 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	83%
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72 paket	36 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	83%
Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7190 paket	2910 paket	600 paket	600 paket	100%	700 paket	700 paket	57%
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	72 paket	36 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	83%
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6900 dokumen	1890 dokumen	1050 dokumen	1050 dokumen	100%	1000 dokumen	1000 dokumen	57%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2973 laporan	1455 laporan	450 laporan	450 laporan	100%	550 laporan	550 laporan	62%

Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan BMD	98 unit	0	54 unit	54 unit	100%	31 unit	31 unit	31,63%
Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	11 unit motor , 1 unit mobil sekretaris dan 1 unit mobil kepala dinas	0	0	0	0%	0	0	0%
Sub Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit mobil operasional	0	0	0	0%	1 unit	1 unit	100%
Sub Kegiatan pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	64 unit	0	34 unit	34 unit	100%	30 unit	30 unit	100%
Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 unit	0 unit	20 unit	20 unit	100%	0 unit	0 unit	100%
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase peningkatan kenyamanan kantor	600%	300%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	72 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	83%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	72 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	83%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	83%

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah total Barang Milik Daerah yang dipelihara	55 unit	55 unit	55 unit	55 unit	100%	55 unit	55 unit	100%
Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit mobil dan 10 unit motor	2 unit mobil dan 10 unit motor	2 unit mobil dan 10 unit motor	2 unit mobil dan 10 unit motor	100%	2 unit mobil dan 10 unit motor	2 unit mobil dan 10 unit motor	100%
Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	100%	40 unit	40 unit	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	1 unit	2 unit	1 unit	50%	3 unit	3 unit	67%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
Program Penataan Desa	Persentase desa dengan penataan yang baik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan penyelenggaraan penataan desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub kegiatan pembinaan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	2 desa		2 desa	0 desa	0%	2 desa	2 desa	100%
Sub kegiatan fasilitasi tata wilayah desa	Jumlah desa yang difasilitasi penataan wilayahnya	10 desa	0 desa				10 desa	10 desa	100%

Program Fasilitas Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Fasilitas kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Fasilitas kerjasama antar Desa dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			100%
Sub Kegiatan Fasilitas pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitas pembangunan kawasan perdesaan	5 Dokumen	1 Dokumen						20%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang telah mendapatkan pelatihan	67%	40%	58%	43%	100%	61%	61%	91%
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase aparatur desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	1 Dokumen	1 Dokumen						100%
Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan produk hukum desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	456 Dokumen	0	114 Dokumen	114 Dokumen	100%	0	0	25%
Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	456 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0%
Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	684 Dokumen	342 Dokumen	114 Dokumen	114 Dokumen	100%	114 Dokumen	114 Dokumen	83%

RENCANA KERJA

2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	Jumlah aparaturn pemerintah desa yang mengikut pembinaan peningkatan kapasitas	342 orang	157 orang	57 orang	57 orang	100%	57 orang	57 orang	79%
Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	83%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	114 laporan	43 laporan				0 laporan	0 laporan	38%
Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	83%
Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil fasilitas manajemen pemerintahan desa	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	83%
Sub Kegiatan Fasilitas penetapan dan penegeasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegeasan batas desa	40 Desa	6 Desa	10 Desa	10 Desa	100%	10 Desa	10 Desa	65%
Sub Kegiatan Fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	12 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	83%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat adat yang masyarakat adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	422 lembaga	422 lembaga	422 lembaga	422 lembaga	100%	422 lembaga	422 lembaga	100%
Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	6 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	83%
Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0 laporan	0%
Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyelenggaraan ketentraman,keterbiban dan perlindungan masyarakat desa	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	80%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan dibidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut penyajian analisis pencapaian kinerja perangkat daerah pada Tabel T-C.30;

Tabel T.C. 30
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10		11	13	14		
1			Persentase pengentasan Desa Tertinggal	87,50%	100%	100%	100%	100%	87,50%	100%	100%	100%	100%			
2			Persentase peningkatan Desa Mandiri	0,00%	1,10%	1,09%	1,08%	1,08%	12,79%	6,59%	13,79%	5,26%	11,00%			
3	Persentase desa yang tertata dengan baik			100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%			
4	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi				13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD		13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD			
5	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi			114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa			
6	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

Untuk menuju masyarakat desa yang mandiri, DPMD perlu mengangkat isu-isu kembali faktor-faktor pelayanan yang merupakan permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari gambaran pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya batas desa dengan titik koordinat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati
2. Pembinaan, dan Penyaluran dana desa dan Alokasi Dana Desa
3. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
4. Belum optimalnya kerjasama desa
5. Belum optimalnya BUM desa dan BUM desa Bersama

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKP

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Akhir RKP Tahun 2026
Kabupaten Taniung Jabung Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Rancangan RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	83	Rp6.105.320		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	84	Rp6.105.320		
			Nilai SAKIP DPMD	72					Nilai SAKIP DPMD	73			
01.2.01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah jenis laporan tahunan yang disusun	6 dokumen	Rp 70.000		Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah jenis laporan tahunan yang disusun	6 dokumen	Rp 70.000		
01.2.01.0006	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	DPMD Kab. Taniabbar	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian dan iktisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan triwulan	Rp 70.000		Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	DPMD Kab. Taniabbar	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian dan iktisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan triwulan	Rp 70.000		

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.2.02	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase Tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan	100%	Rp 4.250.000	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase Tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan	100%	Rp 4.250.000	
01.2.02.0001	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 orang	Rp 4.000.000	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 orang	Rp 4.000.000	
01.2.02.0002	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	Rp 250.000	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	Rp 250.000	
01.2.05	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase peningkatan disiplin pegawai	100%	Rp 72.900	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase peningkatan disiplin pegawai	100%	Rp 72.900	
01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100 paket	Rp 53.900	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100 paket	Rp 53.900	
01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	Rp 19.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	Rp 19.000	
01.02.06	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah		Persentase cakupan layanan administrasi umum	100%	Rp 934.420	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah		Persentase cakupan layanan administrasi umum	100%	Rp 934.420	
01.02.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	Rp 11.000	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	Rp 11.000	

01.02.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	Rp 48.000	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	Rp 48.000	
01.02.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1224 paket	Rp 21.420	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1224 paket	Rp 21.420	
01.02.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	Rp 45.000	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	Rp 45.000	
01.02.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	1500 dokumen	Rp 9.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	1500 dokumen	Rp 9.000	
01.02.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	dalam dan luar Kab. Tanjabbar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	700 laporan	Rp 800.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	dalam dan luar Kab. Tanjabbar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	700 laporan	Rp 800.000	
01.2.07	Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah pengadaan BMD	49 unit	Rp 399.000	Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah pengadaan BMD	49 unit	Rp 399.000	
01.2.07.0001	Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	6 unit	Rp 153.000	Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMD Kab. Tanjabbar	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	6 unit	Rp 153.000	

RENCANA KERJA 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.2.07.0005	Sub Kegiatan pengadaan mebel	DPMMD Kab. Tangjabbar	Jumlah paket mebel yang disediakan	30 unit	Rp 36.000	Sub Kegiatan pengadaan mebel	DPMMD Kab. Tangjabbar	Jumlah paket mebel yang disediakan	30 unit	Rp 36.000	
01.2.07.0006	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	DPMMD Kab. Tangjabbar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 unit	Rp 210.000	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	DPMMD Kab. Tangjabbar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 unit	Rp 210.000	
01.02.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 137.000	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 137.000	
01.02.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DPMMD Kab. Tangjabbar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	Rp 2.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DPMMD Kab. Tangjabbar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	Rp 2.000	
01.02.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DPMMD Kab. Tangjabbar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Rp 95.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DPMMD Kab. Tangjabbar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Rp 95.000	
01.02.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DPMMD Kab. Tangjabbar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Rp 40.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DPMMD Kab. Tangjabbar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Rp 40.000	
01.02.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah total barang milik daerah yang dipelihara	55 unit	Rp 242.000	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah total barang milik daerah yang dipelihara	55 unit	Rp 242.000	

RENCANA KERJA

2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.02.09.0001	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMd Kab. Tangjabbar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	Rp 175.000	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMd Kab. Tangjabbar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	Rp 175.000	
01.02.09.0006	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPMd Kab. Tangjabbar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	Rp 17.000	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPMd Kab. Tangjabbar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	Rp 17.000	
01.02.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DPMd Kab. Tangjabbar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	Rp 50.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DPMd Kab. Tangjabbar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	Rp 50.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp 6.552.800	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp 6.552.800	
2.13.02	Program Penataan Desa		Persentase desa dengan penataan yang baik	100%	Rp 250.000	Program Penataan Desa		Persentase desa dengan penataan yang baik	100%	Rp 250.000	
2.13.02.2.01.001	Kegiatan penyelenggaraan penataan desa		Persentase penyelenggaraan penataan desa	100%	Rp 250.000	Kegiatan penyelenggaraan penataan desa		Persentase penyelenggaraan penataan desa	100%	Rp 250.000	

RENCANA KERJA

2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.02.2.01.001	Sub kegiatan pembentukan, penggabungan dan perubahan status desa	Kec. Batang Asam dan Tebing Tinggi	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penggabungan dan perubahan status desa	2 desa	Rp 250.000	Sub kegiatan pembentukan, penggabungan dan perubahan status desa	Kec. Batang Asam dan Tebing Tinggi	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penggabungan dan perubahan status desa	2 desa	Rp 250.000	
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Persentase desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	100%	Rp 170.000	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Persentase desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	100%	Rp 170.000	
2.13.03.2.01	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa		Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	100%	Rp 170.000	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa		Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	100%	Rp 170.000	
2.13.03.2.01.003	Sub Kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 dokumen	Rp 170.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 dokumen	Rp 170.000	
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase aparatur desa yang telah mendapatkan pelatihan	64%	Rp 3.582.800	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase aparatur desa yang telah mendapatkan pelatihan	64%	Rp 3.582.800	
2.13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Persentase aparatur desa yang dibina	100%	Rp 3.582.800	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Persentase aparatur desa yang dibina	100%	Rp 3.582.800	
2.13.04.2.01.002	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan produk hukum desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	114 dokumen	Rp 161.000	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan produk hukum desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	114 dokumen	Rp 161.000	

RENCANA KERJA

2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.003	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	114 dokumen	Rp 203.800	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	114 dokumen	Rp 203.800
2.13.04.2.01.004	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	114 dokumen	Rp 220.000	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	114 dokumen	Rp 220.000
2.13.04.2.01.005	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatut pemerintah desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah aparatut pemerintah desa yang mengikti pembinaan peningkatan kapasitas	114 orang	Rp 280.000	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatut pemerintah desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah aparatut pemerintah desa yang mengikti pembinaan peningkatan kapasitas	114 orang	Rp 280.000
2.13.04.2.01.008	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	1 dokumen	Rp 251.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	1 dokumen	Rp 251.000
2.13.04.2.01.009	Sub Kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa	15 laporan	Rp 1.100.000	Sub Kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa	15 laporan	Rp 1.100.000
2.13.04.2.01.011	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan profil desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen profil desa	1 dokumen	Rp 250.000	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan profil desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen profil desa	1 dokumen	Rp 250.000
2.13.04.2.01.013	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan aset desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	1 dokumen	Rp 120.000	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan aset desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	1 dokumen	Rp 120.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0 014	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	114 orang	Rp 250.000	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	114 orang	Rp 250.000	
2.13.04.2.01.0 015	Sub Kegiatan Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	10 desa	Rp 280.000	Sub Kegiatan Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	10 desa	Rp 280.000	
2.13.04.2.01.0 016	Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah laporan hasil pembinaan laporan kepala desa	114 laporan	Rp 167.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Kab. Tanjabbar	Jumlah laporan hasil pembinaan laporan kepala desa	114 laporan	Rp 167.000	
2.13.04.2.01.0 018	Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 dokumen	Rp 300.000	Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 dokumen	Rp 300.000	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	Rp 2.550.000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	Rp 2.550.000	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01	Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	Rp 2.550.000	Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	Rp 2.550.000	
2.13.05.2.01.003	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	422 lembaga	Rp 670.000	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	422 lembaga	Rp 670.000	
2.13.05.2.01.005	Sub Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 dokumen	Rp 300.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 dokumen	Rp 300.000	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.006	Sub Kegiatan Fasilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Kab. Tanjabbar	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan	Rp 180.000	Sub Kegiatan Fasilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Kab. Tanjabbar	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan	Rp 180.000	
2.13.05.2.01.009	Sub Kegiatan Fasilitas Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	Rp 1.400.000	Sub Kegiatan Fasilitas Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kab. Tanjabbar	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	Rp 1.400.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMD

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penjabaran dari RPJM Nasional bagi setiap Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif, penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 2 (dua) Kementerian/Lembaga, yaitu :

1. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
2. Kementerian Dalam Negeri

Kemudian yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi adalah sebagai berikut:

Faktor Penghambat yaitu :

1. Masih kurangnya kapasitas SDM
2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana

Faktor Pendorong, yaitu;

1. Adanya bantuan keuangan dari pemerintah
2. Adanya SDA yang banyak
3. Adanya peraturan dari pemerintah

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan capaian target kinerja tahun lalu untuk dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan misi, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Dengan demikian tujuan disusunnya rencana kerja ini adalah untuk memperjelas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tujuan dan sasaran serta untuk mencapai misi yang telah ditetapkan, tujuannya adalah meningkatkan keberdayaan desa dengan sasarnya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, maka sasaran program yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penataan desa
- b. Meningkatnya kerjasama yang dilakukan oleh desa
- c. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- d. Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan sudah berdasarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 3406 Tahun 2024.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung barat yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah untuk pencapaian tujuan dan sasaran, kemudian dengan memperhatikan beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain;

1. Keterbatasan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik.
3. Masih lemahnya pemahaman aparatur pelaksana di desa terkait tata kelola keuangan dan pembangunan desa serta penerapan Teknologi Tepat Guna.
4. Belum optimalnya pengelolaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama
5. Partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan semakin lunturnya budaya gotong royong.
6. Terbatasnya tenaga teknis pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait, maka program kerja yang akan direncanakan Tahun 2026 ini adalah sebagaimana berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan;
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah dengan sub kegiatan;
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan sub kegiatan;
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya
4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan sub kegiatan;
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Sub kegiatan pengadaan mebel
 - Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
6. Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan;
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II. Program Penataan Desa

Kegiatan Penyelenggaraan penataan desa, dengan sub kegiatan;

- pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa

III. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota dengan sub kegiatan;

- Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan

III. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan sub kegiatan;

- Fasilitasi penyusunan produk hukum desa
- Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa
- Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

- Fasilitasi penyusunan profil desa
- Fasilitasi pengelolaan aset desa
- Pembinaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
- Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa
- Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa
- Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

IV. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan;

- Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
- Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
- Fasilitasi tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Berikut Tabel T-C.33;

T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
				5	6					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD		83	Rp 6.105.320.000			84	Rp 6.765.000.000	
		Nilai SAKIP DPMD		72			73			
01.2.01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah jenis laporan tahunan yang disusun		6 dokumen	Rp 70.000.000			6 dokumen	Rp 75.000.000	
01.2.01.0006	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMD Kab. Tanjungbar	8 laporan triwulan	Rp 70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 laporan triwulan	Rp 75.000.000	
01.2.02	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan		100%	Rp 4.250.000.000			100%	Rp 4.775.000.000	
01.2.02.0001	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DPMD Kab. Tanjungbar	31 orang	Rp 4.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31 orang	Rp 4.500.000.000	
01.2.02.0002	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DPMD Kab. Tanjungbar	12 dokumen	Rp 250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen	Rp 275.000.000	
01.2.05	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase peningkatan disiplin pegawai		100%	Rp 72.900.000			100%	Rp 80.000.000	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaiain Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaiain dinas beserta atribut kelengkapan	DPMd Kab. Tanjabbar	100 paket	Rp	53.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 paket	Rp	60.000.000
01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	DPMd Kab. Tanjabbar	3 orang	Rp	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 orang	Rp	20.000.000
01.02.06	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase cakupan layanan administrasi umum		100%	Rp	934.420.000		100%	Rp	1.040.000.000
01.02.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	DPMd Kab. Tanjabbar	12 paket	Rp	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	Rp	12.000.000
01.02.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DPMd Kab. Tanjabbar	12 paket	Rp	48.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	Rp	50.000.000
01.02.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	DPMd Kab. Tanjabbar	1224 paket	Rp	21.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1224 paket	Rp	22.000.000
01.02.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DPMd Kab. Tanjabbar	12 paket	Rp	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	Rp	46.000.000
01.02.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	DPMd Kab. Tanjabbar	1500 dokumen	Rp	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1500 dokumen	Rp	10.000.000
01.02.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	dalam dan luar Kab. Tanjabbar	700 laporan	Rp	800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	800 laporan	Rp	900.000.000
01.2.07	Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan BMD		49 unit	Rp	399.000.000		42 unit	Rp	390.000.000
01.2.07.0001	Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	DPMd Kab. Tanjabbar	6 unit	Rp	153.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 unit	Rp	150.000.000
01.2.07.0005	Sub Kegiatan pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	DPMd Kab. Tanjabbar	30 unit	Rp	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 unit	Rp	40.000.000
01.2.07.0006	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	DPMd Kab. Tanjabbar	13 unit	Rp	210.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 unit	Rp	200.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	Rp	137.000.000		100%	Rp	147.000.000
01.02.08										
01.02.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	DPMD Kab. Tanjabbar	12 laporan	Rp	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	Rp	2.000.000
01.02.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	DPMD Kab. Tanjabbar	12 laporan	Rp	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	Rp	100.000.000
01.02.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DPMD Kab. Tanjabbar	12 laporan	Rp	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	Rp	45.000.000
01.02.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah total barang milik daerah yang dipelihara		55 unit	Rp	242.000.000		55 unit	Rp	258.000.000
01.02.09.0001	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPMD Kab. Tanjabbar	2 unit mobil dan 10 unit motor	Rp	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 unit mobil dan 10 unit motor	Rp	180.000.000
01.02.09.0006	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	DPMD Kab. Tanjabbar	40 unit	Rp	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 unit	Rp	18.000.000
01.02.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	DPMD Kab. Tanjabbar	3 unit	Rp	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 unit	Rp	60.000.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp	6.552.800.000			Rp	8.126.800.000
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa dengan penataan yang baik		100%	Rp	250.000.000		100%	Rp	250.000.000
2.13.02.2.01	Kegiatan penyelenggaraan penataan desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa		100%	Rp	250.000.000		100%	Rp	250.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.02.2.01.0001	Sub Kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	Desa persiapan Sungai Ari, Kec. Batang Asam dan Desa persiapan Rimbo Asri, Kec. Tebing Tinggi	2 desa	Rp 250.000.000			2 desa	Rp 250.000.000
2.13.03	Program Fasilitas Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melaksanakan kerjasama antar desa		100%	Rp 170.000.000			100%	Rp 180.000.000
2.13.03.2.01	Kegiatan Fasilitas kerjasama antar desa	Persentase kerjasama desa yang difasilitasi		100%	Rp 170.000.000			100%	Rp 180.000.000
2.13.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitas pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Kab. Tanjungbar	1 dokumen	Rp 170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	Rp 180.000.000
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparat desa yang telah mendapatkan pelatihan		64%	Rp 3.582.800.000			67%	Rp 5.021.800.000
2.13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase aparat desa yang dibina		100%	Rp 3.582.800.000			100%	Rp 5.021.800.000
2.13.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan produk hukum desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	Kab. Tanjungbar	114 dokumen	Rp 161.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		114 dokumen	Rp 161.000.000
2.13.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	Kab. Tanjungbar	114 dokumen	Rp 203.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		114 dokumen	Rp 203.800.000
2.13.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	Kab. Tanjungbar	114 dokumen	Rp 220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		114 dokumen	Rp 220.000.000
2.13.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Kab. Tanjungbar	114 orang	Rp 280.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		157 orang	Rp 350.000.000
2.13.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Kab. Tanjungbar	1 dokumen	Rp 251.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	Rp 260.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0009	Sub Kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Kab. Tanjungbar	15 laporan	Rp 1.100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	56 laporan	Rp 2.400.000.000
2.13.04.2.01.0011	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa	Kab. Tanjungbar	1 dokumen	Rp 250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	Rp 260.000.000
2.13.04.2.01.0013	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	Kab. Tanjungbar	1 dokumen	Rp 120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	Rp 120.000.000
2.13.04.2.01.0014	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Kab. Tanjungbar	114 orang	Rp 250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	114 orang	Rp 275.000.000
2.13.04.2.01.0015	Sub Kegiatan Fasilitasi penetapan dan pengesahan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi penetapan dan pengesahan batas desa	Kab. Tanjungbar	10 desa	Rp 280.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 desa	Rp 280.000.000
2.13.04.2.01.0016	Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Jumlah laporan hasil pembinaan laporan kepala desa	Kab. Tanjungbar	114 laporan	Rp 167.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	114 laporan	Rp 167.000.000
2.13.04.2.01.0018	Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Kab. Tanjungbar	2 dokumen	Rp 300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	Rp 325.000.000
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang aktif		100%	Rp 2.550.000.000		100%	Rp 2.675.000.000
2.13.05.2.01	Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelaksana hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan		100%	Rp 2.550.000.000		100%	Rp 2.675.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Tanjungbar	422 lembaga	Rp 670.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	422 lembaga	Rp 700.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Kab. Tanjabbar	1 dokumen	Rp 300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	Rp 325.000.000
2.13.05.2.01.0006	Sub Kegiatan Fasilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Kab. Tanjabbar	1 laporan	Rp 180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	Rp 200.000.000
2.13.05.2.01.0009	Sub Kegiatan Fasilitas Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kab. Tanjabbar	1 dokumen	Rp 1.400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	Rp 1.450.000.000
JUMLAH					Rp 12.658.120.000			Rp 14.891.800.000

Kuala Tungkal, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Muhammad Natsir, S.I.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19840624 201101 1 005

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Sasaran	INDIKATOR KINERJA						Pagu Indikatif kebutuhan dana TA.2026	Praktiraa Maju Tahun 2027	Sumber Dana	
				Hasil Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	Meningkatnya kualitas pengelolaan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	83				8	9	10	11	12
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA			Nilai SAKIP	72						Rp 6.105.320.000	Rp 6.765.000.000	
01.2.0 1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Jumlah dokumen tahunan yang disusun	6 dokumen				Rp 70.000.000	Rp 75.000.000	
01.2.0 1.0006	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMMD Kab. Tanjabb ar	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan		Rp 70.000.000	Rp 75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
01.2.0 2	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan SKPD			Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100%				Rp 4.250.000.000	Rp 4.775.000.000	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.2.0 2.0001	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPMMD Kab. Tanjung ar	Meningkatnya kesejahteraan pegawai				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 orang	Rp 4.000.000.000	Rp 4.500.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
01.2.0 2.0002	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DPMMD Kab. Tanjung ar	Meningkatnya semangat dalam bekerja				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	Rp 250.000.000	Rp 275.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
01.2.0 5	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Meningkatnya kedisiplinan pegawai Dinas PMD	Persentase peningkatan disiplin pegawai	100%			Rp 72.900.000	Rp 80.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
01.2.0 5.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakatan Dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMMD Kab. Tanjung ar	Meningkatnya kerapian pegawai Dinas PMD				Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100 paket	Rp 53.900.000	Rp 60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
01.2.0 5.0003	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	DPMMD Kab. Tanjung ar	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja pegawai Dinas PMD				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	Rp 19.000.000	Rp 20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
01.02. 06	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah		Meningkatnya kinerja bagi pegawai Dinas PMD	Cakupan layanan administrasi umum	100%			Rp 934.420.000	Rp 1.040.000.000		
01.02. 06.000 1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMMD Kab. Tanjung ar	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	Rp 11.000.000	Rp 12.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.02.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD Kab. Tanjabb ar	Tersedianya alat-alat tulis kantor				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	Rp 48.000.000	Rp 50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
01.02.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	DPMD Kab. Tanjabb ar	Tersedianya makan minum rapat				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1224 paket	Rp 21.420.000	Rp 22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
01.02.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD Kab. Tanjabb ar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	Rp 45.000.000	Rp 46.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
01.02.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMD Kab. Tanjabb ar	Tersedianya bahan bacaan				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1500 dokumen	Rp 9.000.000	Rp 10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
01.02.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPMD Kab. Tanjabb ar	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	700 laporan	Rp 800.000.000	Rp 900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
01.02.07	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan			Jumlah pengadaan BMD	100%		Rp 399.000.000	Rp 390.000.000	
01.02.08.0001	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMD Kab. Tanjabb ar	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	6 unit motor	Rp 153.000.000	Rp 150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

RENCANA KERJA 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.02.08.0002	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	DPMMD Kab. Tanjabb ar	Tersedianya mebel				Jumlah paket mebel yang disediakan	30 unit	Rp 36.000.000	Rp 40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
01.02.08.0004	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	DPMMD Kab. Tanjabb ar	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 unit	Rp 210.000.000	Rp 200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
01.02.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%				Rp 137.000.000	Rp 147.000.000	
01.02.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DPMMD Kab. Tanjabb ar	Tersedianya jasa surat menyurat				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
01.02.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DPMMD Kab. Tanjabb ar	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Rp 95.000.000	Rp 100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
01.02.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DPMMD Kab. Tanjabb ar	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Rp 40.000.000	Rp 45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
01.02.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Jumlah total barang milik daerah yang terpelihara	55 unit				Rp 242.000.000	Rp 258.000.000	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.02.09.0001	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMID Kab. Taniabb ar	Terpeliharanya kendaraan dinas				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	Rp 175.000.000	Rp 180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
01.02.09.0006	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPMID Kab. Taniabb ar	Terpeliharanya peralatan kantor				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	Rp 17.000.000	Rp 18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
01.02.09.0009	Sub kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DPMID Kab. Taniabb ar	Terpeliharanya gedung kantor				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	Rp 50.000.000	Rp 60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								Rp 6.552.800.000	Rp 8.126.800.000	
2.13.02	Program Penataan Desa		Meningkatnya penataan desa	Persentase desa yang dilakukan penataan	100%				Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	
2.13.02.2.01	Kegiatan penyelenggaraan penataan desa		Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100%				Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	

2.13.0 2.2.01. 0001	Sub Kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Desa persiapan Sungai Ari, Kec. Batang Asam dan Desa persiapan Rimbo Asri, Kec. Tebing Tinggi	Meningkatnya jumlah desa					Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	2 desa	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	
2.13.0 Program Peningkatan Kerjasama Desa			Meningkatnya kerjasama desa	Persentase desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	100%					Rp 170.000.000	Rp 180.000.000	
2.13.0 3.2.01	Kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota		Meningkatnya kerjasama antar desa			Persentase hasil fasilitasi kerjasama antar desa	100%			Rp 170.000.000	Rp 180.000.000	
2.13.0 3.2.01. 0003	Sub Kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Kab. Tanjung Barat						Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 dokumen	Rp 170.000.000	Rp 180.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.13.0 4	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Meningkatnya administrasi pemerintahan desa	Persentase aparatur desa yang telah mendapatkan pelatihan	64%					Rp 3.582.800.000	Rp 5.021.800.000	
2.13.0 4.2.01	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa			Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%			Rp 3.582.800.000	Rp 5.021.800.000	

2.13.0 4.2.01. 0002	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan produk hukum desa	Kab. Tanjung Barat	Tertaksananya evaluasi peraturan desa				Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	114 dokumen	Rp 161.000.000	Rp 161.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.13.0 4.2.01. 0003	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya perencanaan pembangunan desa				Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	114 dokumen	Rp 203.800.000	Rp 203.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.13.0 4.2.01. 0004	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang baik				Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	114 dokumen	Rp 220.000.000	Rp 220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.13.0 4.2.01. 0005	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah desa				Jumlah aparat pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	114 orang	Rp 280.000.000	Rp 350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.13.0 4.2.01. 0008	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya keberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa				Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	1 dokumen	Rp 251.000.000	Rp 260.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.13.0 4.2.01. 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Kab. Tanjung Barat	Terselenggaranya pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa				Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	15 laporan	Rp 1.100.000.000	Rp 2.400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.0 4.2.01. 0011	Sub Kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa	Kab. Tanjung Barat	Terfasilitasinya penyusunan profil desa				Jumlah dokumen profil desa	1 dokumen	Rp 250.000.000	Rp 260.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.13.0 4.2.01. 0013	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya pengelolaan aset desa yang baik				Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	1 dokumen	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.13.0 4.2.01. 0014	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa				Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	114 orang	Rp 250.000.000	Rp 275.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.13.0 4.2.01. 0015	Sub Kegiatan Fasilitasi penetapan dan penegakan batas desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya jumlah desa dengan batas yang jelas				Jumlah desa yang difasilitasi penetapan dan penegakan batas desa	10 desa	Rp 280.000.000	Rp 280.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.13.0 4.2.01. 0016	Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya kualitas laporan kepala desa				Jumlah laporan hasil pembinaan laporan kepala desa	114 laporan	Rp 167.000.000	Rp 167.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.13.0 4.2.01. 0018	Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya perkembangan desa dan kelurahan				Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 dokumen	Rp 300.000.000	Rp 325.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.13.0 5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%				Rp 2.550.000.000	Rp 2.675.000.000	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.0 5.2.01	Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat polakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota		Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	100%	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya			Rp 2.550.000.000	Rp 2.675.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.13.0 5.2.01.0003	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna). Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat	Kab. Tangab Barat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat				Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	422 lembaga		Rp 670.000.000	Rp 700.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.13.0 5.2.01.0005	Sub Kegiatan Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Kab. Tangab Barat	Meningkatnya usaha ekonomi desa				Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 dokumen		Rp 300.000.000	Rp 325.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

2.13.0 5.2.01. 0006	Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna					Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan	Rp 180.000.000	Rp 200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.13.0 5.2.01. 0009	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kab. Tanjung Barat	Tertaksananya 10 program pokok PKK					Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	Rp 1.400.000.000	Rp 1.450.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Jumlah										Rp 12.658.120.000	Rp 14.891.800.000	

Kuala Tungkal, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Mohammad Natsir, S.I.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19840624 201101 1 005

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini dibuat dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka untuk penetapan rencana kerja ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja.

Keberhasilan dari rencana kerja bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi banyak dipengaruhi implementasi penerapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang optimal sesuai dengan tujuan RPJMD 2021-2026. Untuk itu diperlukan saran dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang, sehingga perencanaan lebih baik lagi.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dengan harapan semoga dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kuala Tungkal, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Muhammad Natsir, S.I.P
Pembina Tingkat I
NIP. 198406242011011005